

# Dampak Sosial Penggunaan Sistem Informasi Desa bagi Masyarakat Pedesaan

<sup>1</sup> Ali Imron, <sup>2</sup>Muhammad Fauzan Aditiya Mufid, <sup>3</sup>Erna Daniati

*Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Sistem Informasi  
Universitas Nusantara PGRI Kediri*

*Email: [1aliimron14031990@gmail.com](mailto:1aliimron14031990@gmail.com), [2faizaditiya1915@gmail.com](mailto:2faizaditiya1915@gmail.com), [3ernadaniati@unpkediri.ac.id](mailto:3ernadaniati@unpkediri.ac.id)*

**Abstrak**— Penggunaan sistem informasi desa melalui kanal digital seperti media sosial dan situs web desa telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Artikel ini mengelaborasi dampak sosial dari penggunaan sistem informasi desa bagi masyarakat pedesaan dengan mengacu pada teori institionalisasi praktik akuntansi, partisipasi kewargaan, dan good governance. Berdasarkan analisis literatur dan data sekunder, ditemukan bahwa media sosial berfungsi tidak hanya sebagai alat penyebarluasan informasi, tetapi juga sebagai wahana edukasi, kontrol sosial, dan pembangunan komunitas. Namun, masih terdapat tantangan serius seperti rendahnya literasi digital, minimnya kapasitas aparatur desa, serta kurangnya dukungan infrastruktur teknologi di desa-desa terpencil. Artikel ini memberikan rekomendasi konkret bagi optimisasi sistem informasi desa demi mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

**Kata Kunci**— sistem informasi desa; tata kelola desa; transparansi;

**Abstract**— *The use of village information systems through digital channels such as social media and village websites has brought about major changes in village governance, especially in terms of transparency, accountability, and public participation. This article elaborates on the social impacts of the use of village information systems for rural communities by referring to the institutionalization theory of accounting practices, citizen participation, and good governance. Based on the analysis of literature and secondary data, it was found that social media functions not only as a tool for disseminating information, but also as a vehicle for education, social control, and community development. However, there are still serious challenges such as low digital literacy, minimal capacity of village officials, and lack of technological infrastructure support in remote villages. This article provides concrete recommendations for optimizing village information systems to support more transparent, accountable, and participatory village governance.*

**Keywords**— *village information systems; village governance; transparency*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan dampak besar bagi penyelenggaran suatu organisasi tidak terkecuali pada tata kelola pemerintahan baik dari pemerintahan tingkat atas maupun tingkat bawah dalam lingkup desa. Bentuk penerapan teknologi informasi ini seperti diterapkannya sistem informasi desa atau disingkat SID yang saat ini telah banyak diterapkan pada sistem pemerintahan desa di indonesia. Penerapan ini seperti

penggunaan situs web resmi desa maupun penggunaan media sosial. Penerapan sistem informasi desa memiliki peranan sebagai penghubung informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, selain itu berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat publik dalam pembangunan desa.

Penerapan sistem informasi desa didorong oleh kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaporan dana desa yang berasal dari APBN harus diselenggarakan dengan terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Dalam konteks ini, media sosial menjadi wadah dalam menyampaikan informasi tentang realisasi anggaran, program kerja, dan kebijakan desa secara langsung kepada warga.

Dalam penerapan SID tidak serta-merta berjalan mulus. Banyak desa masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak sosial dari penggunaan SID secara menyeluruh, untuk perencanaan strategi peningkatan penerapan sistem informasi desa. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengeksplorasi dampak sosial penggunaan sistem informasi desa bagi masyarakat pedesaan. Fokus utama kajian ini adalah pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan penguatan institusi pemerintahan desa melalui media sosial

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial yang timbul dari penggunaan sistem informasi desa (SID), khususnya melalui media sosial, berdasarkan data sekunder yang sudah tersedia dari berbagai sumber ilmiah dan publikasi resmi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan proses sosial yang tidak dapat diukur secara numerik, tetapi dapat dipahami secara mendalam melalui interpretasi terhadap teks dan konteks.

### A. Pendekatan Studi Pustaka

Penelitian studi pustaka melibatkan pencarian, seleksi, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber tersebut meliputi:

- Jurnal ilmiah nasional dan internasional.
- Buku teks di bidang akuntansi sektor publik, komunikasi digital, dan pemerintahan desa.
- Dokumen kebijakan pemerintah (seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
- Artikel opini, laporan penelitian, dan data sekunder lainnya yang tersedia secara daring.

Studi pustaka digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola teoretis dan praktik yang telah teruji di berbagai konteks, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memahami fenomena sosial terkait SID.

#### 1. Sistem Informasi Desa (SID)

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan desa modern. SID mencakup perangkat teknologi dan prosedur administratif yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi yang relevan mengenai kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, serta pelayanan publik. Tujuannya adalah menciptakan keterbukaan informasi, efisiensi pelayanan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Menurut Arianto (2023), kehadiran media sosial sebagai bagian dari SID telah mengubah pola komunikasi pemerintahan desa dari model satu arah menjadi dua arah yang interaktif

dan partisipatif. Melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, pemerintah desa dapat menyampaikan informasi secara real-time dan masyarakat pun dapat memberikan umpan balik secara langsung.

## 2. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa

Transparansi diartikan sebagai ketersediaan dan kemudahan akses publik terhadap informasi yang lengkap, benar, dan tepat waktu, sementara akuntabilitas mengacu pada kewajiban aparatur publik untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan yang diambil (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Penguatan tata kelola media sosial desa dapat menjadi bagian dari institusionalisasi praktik akuntansi, di mana prinsip transparansi dan akuntabilitas dijadikan standar dalam pengelolaan dana publik (Arianto, 2023; Biondi & Lapsley, 2014).

## 3. Media Sosial sebagai Sarana Edukasi dan Pengawasan Sosial

Media sosial memiliki karakteristik yang mendukung proses deliberasi publik. Dreyer dan Ziebarth (2014) menyatakan bahwa media sosial memungkinkan terjadinya “participatory transparency,” yaitu keterbukaan informasi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam produksi dan distribusi informasi. Dalam konteks desa, hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam pembangunan desa.

## 4. Tantangan Pemanfaatan SID

Beberapa tantangan utama dalam implementasi SID antara lain: (1) rendahnya literasi digital masyarakat desa, (2) kurangnya kapasitas teknis aparatur desa, (3) ketakutan terhadap keterbukaan informasi yang bisa menimbulkan kritik, dan (4) infrastruktur teknologi yang belum memadai (Wilopo, 2017; Arianto, 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan sistem informasi desa berfungsi secara optimal.

## B. Sumber Data

Sumber data utama dalam artikel ini adalah:

- Jurnal ilmiah karya Bambang Arianto (2023), yang membahas institusionalisasi praktik akuntansi melalui media sosial desa.
- Publikasi-publikasi lainnya yang membahas tema transparansi, akuntabilitas, literasi digital, dan partisipasi masyarakat dalam konteks pemerintahan desa.

Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan keterkinian (5–10 tahun terakhir), relevansi topik, dan kredibilitas akademik.

## C. Teknik Analisis Data

Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahap sistematis:

### 1. Literatur

Literasi awal dilakukan dengan menjaring literatur yang membahas sistem informasi desa, media sosial, dan tata kelola pemerintahan desa.

### 2. koding tematik

Informasi dari berbagai sumber kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tantangan implementasi SID.

### 3. Analisis deduktif

Temuan yang diperoleh dianalisis secara deduktif, yaitu menguji kesesuaian antara kerangka teori yang digunakan dengan fenomena atau praktik yang dijelaskan dalam literatur.

#### 4. Sintesis Konseptual

Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis, mendalam, dan menghubungkan antara teori dengan konteks empiris di Indonesia.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Media Sosial sebagai Saluran Transparansi Informasi Desa

Media sosial telah menjadi sarana komunikasi yang paling populer dan mudah diakses oleh masyarakat pedesaan, terutama generasi muda. Dalam konteks sistem informasi desa, media sosial digunakan sebagai media utama untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan desa, realisasi anggaran, laporan pelaksanaan pembangunan, dan berbagai bentuk pelayanan publik.

Penelitian Arianto (2023) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh aparatur pemerintahan desa dapat memperkuat indikator transparansi. Hal ini karena masyarakat memperoleh akses langsung terhadap informasi yang sebelumnya hanya tersedia di dokumen tertutup atau rapat desa yang terbatas partisipasinya. Transparansi ini juga mendorong meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan desa, karena mereka merasa dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan.

Contoh konkret datang dari Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul, DIY, yang rutin mempublikasikan data penggunaan dana desa melalui Instagram Story dan unggahan berkala. Masyarakat dapat melihat langsung berapa besar anggaran yang digunakan dan untuk program apa saja. Model ini memperlihatkan bagaimana keterbukaan informasi melalui media sosial membentuk kepercayaan publik dan menjadi bentuk akuntabilitas visual yang efektif.

#### B. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dalam konteks dana desa mencakup pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan dana publik secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Media sosial telah memungkinkan proses ini menjadi lebih terbuka dan bisa diawasi oleh publik secara langsung. Dalam temuan Arianto (2023), setidaknya lima dimensi akuntabilitas publik dapat diperkuat melalui media sosial, yaitu:

1. **Akuntabilitas hukum dan kejujuran**, yang ditunjukkan dengan laporan keuangan publik.
2. **Akuntabilitas manajerial**, berupa informasi hasil kerja aparatur desa.
3. **Akuntabilitas program**, terkait program-program desa yang dijalankan.
4. **Akuntabilitas kebijakan**, yaitu pelaporan peraturan dan perencanaan desa.
5. **Akuntabilitas finansial**, melalui penyajian data anggaran dan pengeluaran.

Media sosial mendorong adanya pengawasan sosial (social audit) secara tidak langsung. Warga yang melihat ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dan kenyataan di lapangan dapat menyuarakan pendapatnya langsung di ruang publik digital. Ini memberi tekanan moral dan sosial kepada perangkat desa untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

#### C. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial

Salah satu dampak sosial paling signifikan dari sistem informasi desa adalah tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi kontributor informasi dan pengawas. Keterlibatan ini menciptakan semangat gotong royong digital—sebuah bentuk kolaborasi antara warga dan pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola.

Partisipasi ini paling terlihat di kalangan pemuda desa yang aktif dalam komunitas Karang Taruna atau organisasi pemuda. Mereka menjadi aktor kunci dalam produksi konten, seperti dokumentasi kegiatan desa, video edukasi tentang penggunaan dana desa, dan pembuatan infografis. Partisipasi ini memberikan efek berantai: masyarakat menjadi lebih melek informasi, peduli, dan turut mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, sebagaimana diungkap oleh informan dalam studi Arianto (2023), partisipasi masih terhambat oleh keterbatasan kompetensi membuat konten dan rendahnya frekuensi pelatihan di bidang komunikasi digital. Oleh karena itu, program pemberdayaan melalui pelatihan pembuatan konten kreatif dan literasi digital menjadi sangat penting.

#### **D. Tantangan dan Solusi dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Desa**

Meskipun media sosial dan sistem informasi desa terbukti memiliki dampak sosial yang positif, penerapannya tidak bebas dari hambatan. Beberapa tantangan utama yang ditemukan antara lain:

1. Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan aparatur desa.
2. Minimnya keberanian aparatur desa untuk transparan, karena kekhawatiran terhadap kritik publik.
3. Kurangnya infrastruktur pendukung, terutama di desa-desa terpencil.
4. Ketidakmerataan akses internet, yang menyebabkan tidak semua warga dapat mengakses informasi yang sama.

Untuk mengatasi hal ini, perlu diterapkan beberapa strategi:

1. Pelatihan dan pendampingan literasi digital secara berkelanjutan bagi aparatur desa dan masyarakat.
2. Membangun kemitraan dengan kampus, LSM, atau komunitas teknologi, untuk membantu desa dalam pengelolaan konten digital.
3. Menyusun standar tata kelola media sosial desa, yang mengatur frekuensi unggahan, jenis konten, dan tanggapan terhadap umpan balik publik.

Pengadaan fasilitas internet publik, seperti Wi-Fi gratis di balai desa atau pusat komunitas.

### **IV. KESIMPULAN**

Penggunaan sistem informasi desa, khususnya melalui media sosial, telah membawa dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat pedesaan di Indonesia. Melalui kanal digital ini, informasi tentang pengelolaan dana desa menjadi lebih terbuka, mudah diakses, dan dapat diawasi secara partisipatif oleh masyarakat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas merupakan manfaat utama yang ditimbulkan dari pemanfaatan media sosial dalam sistem informasi desa. Aparatur desa dapat menyampaikan laporan keuangan, program pembangunan, dan capaian kerja secara langsung kepada publik. Hal ini tidak hanya membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran kritis dan partisipasi sosial.

Partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, memperlihatkan bahwa media sosial dapat menjadi jembatan antara pemerintahan dan warga dalam membangun tata kelola desa yang partisipatif dan demokratis. Di sisi lain, penggunaan media sosial juga menjadi bagian dari proses institusionalisasi praktik akuntansi di tingkat lokal, di mana pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan publik dilakukan secara terbuka dan berbasis digital. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan yang masih perlu diatasi, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta sikap resistensi dari sebagian aparatur desa terhadap keterbukaan informasi. Tanpa penyelesaian atas tantangan-tantangan ini, sistem informasi desa berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal dan malah menjadi beban administratif semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2023). *Tata Kelola Media Sosial sebagai Institusionalisasi Praktik Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia*. Akuntansi dan Teknologi Informasi, 16(2), 106–127. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Biondi, L., & Lapsley, I. (2014). Accounting, transparency and governance: the heritage assets problem. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 11(2), 146–164.
- Dreyer, S., & Ziebarth, L. (2014). Participatory transparency in social media governance: combining two good practices. *Journal of Information Policy*, 4(1), 529–546.
- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas & Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 61–78.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Edisi ke-28). Bandung: Alfabeta.
- Zakariya, R. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282.